



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SCENAIDER CLASEIN HASUDUNGAN SIAHAAN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 128989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.850.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m ² /175 m ² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI		Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 243 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI		Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.000.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI		Rp. 20.000.000
2. MOBIL, BMW X3 Tahun 2021, HASIL SENDIRI		Rp. 980.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.460.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.485.174.297
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.037.790.124
F. HARTA LAINNYA	Rp.	724.593.359
Sub Total	Rp.	8.557.557.780
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.557.557.780

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.